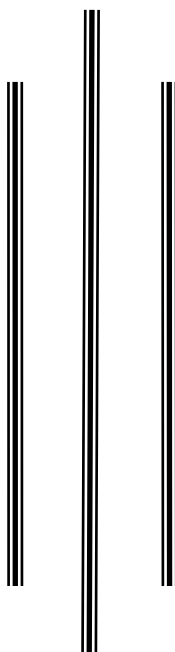




RENCANA KERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



**KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena ridho-Nya telah tersusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Doko Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Doko Tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Doko tahun 2021-2026.

Renja ini memuat target, tujuan, sasaran program serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat direalisasikan. Renja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur Kecamatan Doko sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya memiliki nilai kinerja, semangat kebersamaan dan kekompakan serta kemandirian untuk menuju sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Doko Tahun 2024 ini semoga dapat memberikan arahan bagi kelancaran dan peningkatan kinerja bagi aparat serta memberi kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Blitar khususnya di wilayah Kecamatan Doko.

Doko, September 2024
Camat Doko



M. NUR ANDY AZIS, SP, MM
Pembina Tk I
NIP 19720914 199803 1 005

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Doko merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di kabupaten Blitar, terletak di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Blitar, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Kabupaten Malang
Sebelah selatan	: Kecamatan Kesamben dan Selopuro
Sebelah timur	: Kecamatan Kesamben dan Selorejo
Sebelah barat	: Kecamatan Wlingi

PETA WILAYAH KECAMATAN DOKO



Luas wilayah Kecamatan Doko kurang lebih 76,95 Km² termasuk daerah yang subur dikarenakan abu vulkanik gunung berapi sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik, terdiri dari 10 Desa yaitu :

1. Desa Slorok
2. Desa Genengan
3. Desa Jambepawon
4. Desa Suru
5. Desa Sumberurip

6. Desa Kalimanis
7. Desa Resapombo
8. Desa Sidorejo
9. Desa Genengan
10. Plumbangan

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Doko secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana Doko secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Doko membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Doko Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda Doko tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Doko Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Doko yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Doko Kecamatan.

Pada penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Akhir RKPD. Rancangan rencana kerja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Blitar untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan akhir RKPD. Rancangan Rencana Kerja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026
12. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: 050/657/409.201.3/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2021-2026;

13. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : B/050/345.1/409.3.2/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Doko tahun 2024 :

1. Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Doko jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2024.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Doko dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan Doko dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Doko dalam jangka 1 tahun;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan Doko;
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rancangan Rencana kerja Kecamatan Doko Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Kecamatan Doko adalah salah satu OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pemerintahan dengan 5 (lima) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan.

Pada Tahun 2023, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target B.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 Tahun.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah dari pagu anggaran Rp. 1.650.000,00 terealisasi Rp. 1.650.000,00

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 terealisasi Rp. 1.500.000,00

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dengan target 1 Tahun

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dari pagu anggaran sebesar Rp 1.604.300.010,00 telah terealisasi sebesar Rp. atau 1.270.472.382,00 atau sebesar 79.19%.

Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dari pagu anggaran sebesar Rp 23.640.000,00 terealisasi sebesar Rp 23.640.000,00 atau sebesar 100%.

Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD dari pagu anggaran Rp. 1.230.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.230.000,00

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikatornya "Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian". Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari pagu anggaran Rp. 69.520.000 telah terealisasi sebesar Rp. 68.400.000,00 atau terealisasi 98,38%

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel dengan target 12 bulan.

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dari pagu anggaran sebesar Rp.5.660.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.5.660.000,00 atau 100%.

Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari pagu anggaran sebesar Rp 40.653.225,00 telah terealisasikan sebesar Rp 38.579.440,00 atau sebesar 94,89%.

Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.425.300 terealisasi sebesar 100%

Sub kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dari pagu anggaran Rp 5.560.000,00 terealisasikan Rp.5.560.000,00 atau 100%.

Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari pagu anggaran Rp 3.303.600,00 terealisasikan sebesar Rp 3.303.000,00 atau sebesar 99,98%.

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari pagu anggaran Rp 69.858.700,00 terealisasikan Rp 62.750.039,00 atau sebesar 89,83%.

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 2 jenis.

Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dari pagu anggaran Rp 22.024.000,00 telah terealisasikan sebesar Rp 21.876.700,00 atau sebesar 99,33%.

Pengadaan mebel dari pagu anggaran Rp.15.605.000 terealisasi sebesar Rp. 15.605.000,00

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan.

Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dari pagu Rp 10.834.560,00 terealisasikan Rp 5.535.758,00 atau sebesar 51,09%.

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari pagu Rp 108.708.115,00 terealisasikan sebesar Rp.105.602.496,00 atau 97,14%.

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan.

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dari

pagu anggaran sebesar Rp 33.600.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 33.576.962,00 atau sebesar 89,06%.

Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dari pagu anggaran Rp 3.265.500,00 terealisasi Rp.2.000.000 atau sebesar 63,69%

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dari pagu Rp 30.600.000,00 terealisasi Rp 30.558.000,00 atau sebesar 99,96%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Prosentase desa dengan predikat IKM baik

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator jumlah koordinasi yang diselenggarakan. Sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.350.000 terealisasi 100%

b. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait dengan anggaran sebesar Rp.4.160.000 terealisasi 3.600.000,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan indikator program adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa/kelurahan

Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dari pagu anggaran sebesar Rp 8.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.400.000,00 atau sebesar 64,28%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan target 1 kegiatan.

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dari pagu anggaran sebesar Rp 13.600.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 13.150.000,00 atau sebesar 96,69%.

Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dari pagu anggaran Rp.5.610.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.010.000,00 atau 89,30%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan .

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah koordinasi yang diselenggarakan. Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Dari pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 terealisasi 9.000.000 atau 100 %.

Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.680.000,00 terealisasi 100%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti

Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan

Sub kegiatan Fasilitas Tata Administrasi Tata Pemerintahan Desa dari pagu anggaran sebesar Rp 13.050.000,00 terealisasi Rp.12.600.000,00 atau 96,55%.

Sub kegiatan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan pagu anggaran Rp.8.100.000 terealisasi Rp.7.650.000,00 atau 94,44%

Sub kegiatan fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dengan anggaran Rp.8.550.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.550.000,00

Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya dari pagu anggaran Rp.5.400.000,00 terealisasi 3.975.000,00 atau 73,61

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan :
 - a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada
Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada (harus) dipilhkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai permasalahan di Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada.
 - b. Masih kurang maksimalnya sarana dan prasarana di sekitar kantor
Sudah diakui bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya, kondisi fisik bangunan Kecamatan Doko sudah cukup baik. Pada tahun 2016 sudah dibuat ruang pelayanan seperti selayaknya pelayanan PATEN tetapi masih belum optimal/kurang adanya sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kantor kecamatan yang representative, aman, nyaman, ramah anak, ramah lansia dan peduli terhadap perempuan. Misalnya ruang tunggu yang nyaman, playground, ruang laktasi, loket antrian, kantor dan lingkungannya yang bersih dan nyaman.
 - c. Kurang optimalnya faktor pendukung sarana prasarana.
Kondisi geografis di wilayah Kecamatan Doko sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kemudahan akses informasi. Sehingga dibutuhkan sarana penunjang berupa perangkat computer lengkap yang terhubung jaringan agar memudahkan dalam pelayanan.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Doko adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Doko tahun 2016-2021 berdampak positif yang menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Doko berdampak rendahnya capaian kinerja selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya.

4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BLITAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		KECAMATAN DOKO							2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	-180.232.519,00							2.309.984.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	-180.232.519,00							2.309.984.000,00				
	7.01	KECAMATAN							2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	-180.232.519,00							2.309.984.000,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-				-	-	2.269.828.500,00	2.397.546.540,00	2.078.580.481,00	-289.108.300,00							1.960.720.200,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.400.000,00	3.117.138,00	3.117.138,00	-2.282.862,00			-	-	-		8.500.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	2.700.000,00	1.598.418,00	1.598.418,00	-1.101.582,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8 Laporan	8 Laporan	2.700.000,00	1.518.720,00	1.518.720,00	-1.181.280,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.009.868.000,00	1.750.450.540,00	1.441.670.481,00	-168.197.519,00			-	-	-		1.666.454.517,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.580.078.000,00	1.720.666.540,00	1.399.845.481,00	-180.232.519,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.600.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	28.440.000,00	28.440.000,00	40.475.000,00	12.035.000,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.100.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																					
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi/ SKPD					14 Dokumen	14 Dokumen	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.354.517,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	98.060.000,00	94.160.000,00	24.160.000,00			-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					18 Orang	18 Orang	70.000.000,00	98.060.000,00	94.160.000,00	24.160.000,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	120.341.061,00	133.346.845,00	126.185.482,00	5.844.421,00			-	-	-		70.265.683,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor																					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1.649.682,00	1.649.682,00	1.649.682,00	0,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.550.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	33.248.075,00	40.934.344,00	40.933.973,00	7.685.898,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.281.683,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1.431.234,00	3.101.229,00	3.101.229,00	1.669.995,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	2.577.198,00	12.429.558,00	12.429.558,00	9.852.360,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.434.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	7.964.472,00	4.141.632,00	4.178.040,00	-3.786.432,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					36 Laporan	36 Laporan	73.470.400,00	71.090.400,00	63.893.000,00	-9.577.400,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	65.656.611,00	173.312.145,00	178.943.508,00	113.286.897,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	65.656.611,00	173.312.145,00	178.943.508,00	9.426.897,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					-	1 Unit	0,00	0,00	103.860.000,00	103.860.000,00	Kab. Blitar, Doko, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.372.828,00	132.563.872,00	127.813.872,00	-2.558.956,00			-	-	-		93.000.000,00	KECAMATAN DOKO			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PEMANGGOK JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan				12 Laporan	12 Laporan	9.387.200,00	9.387.200,00	9.387.200,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan				12 Laporan	12 Laporan	120.985.628,00	123.176.672,00	118.426.672,00	-2.558.956,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			83.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	268.190.000,00	106.690.000,00	106.690.000,00	-161.500.000,00			-	-	-			47.500.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			28.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya																					
			Juman Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	195.500.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-161.500.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN DOKO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	12.050.000,00	14.550.000,00	17.750.000,00	58.301.000,00								70.351.000,00	
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	9.800.000,00	12.300.000,00	15.500.000,00	5.700.000,00			-	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																					
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24 Laporan	24 Laporan	9.800.000,00	12.300.000,00	15.500.000,00	5.700.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00			-	-	-			25.351.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Fasilitas/ Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			25.351.000,00	KECAMATAN DOKO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	32.522.000,00	39.607.500,00	44.152.500,00	-12.522.000,00								20.000.000,00	
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	9.872.000,00	12.457.500,00	12.457.500,00	2.585.500,00			-	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																					
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Masyarakat kutan	5 Lembaga Masyarakat kutan	9.872.000,00	12.457.500,00	12.457.500,00	2.585.500,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	22.650.000,00	27.150.000,00	31.695.000,00	9.045.000,00			-	-	-			0,00	KECAMATAN DOKO
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																					
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	30 Keluarga	22.650.000,00	27.150.000,00	31.695.000,00	9.045.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	KECAMATAN DOKO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	47.790.000,00	59.790.000,00	50.190.000,00	135.122.800,00								182.912.800,00	
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	47.790.000,00	59.790.000,00	50.190.000,00	2.400.000,00			-	-	-			182.912.800,00	KECAMATAN DOKO
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	41.790.000,00	43.090.000,00	35.490.000,00	-6.300.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																					
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi/ Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Keri/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			82.912.800,00	KECAMATAN DOKO
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	51.600.000,00	42.885.000,00	42.885.000,00	4.400.000,00								56.000.000,00	
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	51.600.000,00	42.885.000,00	42.885.000,00	-8.715.000,00			-	-	-			56.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	13.050.000,00	16.135.000,00	16.135.000,00	5.085.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Ket Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			10.000.000,00	KECAMATAN DOKO		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	23.250.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	-6.150.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Ket Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			40.000.000,00	KECAMATAN DOKO		
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	15.300.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	-7.650.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua Ket Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	- -	- -			6.000.000,00	KECAMATAN DOKO		
			J U M L A H						2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	247.302.617.423,00							2.309.984.000,00			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja dilaksanakan untuk menganalisis program dan kegiatan yang dilaksanakan di OPD Kecamatan Doko selama tahun 2023. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota indikatornya Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai predikat B pada tahun 2023.
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
 - 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikatornya adalah Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana sesuai target yaitu 2 jenis.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana sesuai target yaitu 12 bulan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan indikator program adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa/kelurahan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan
 - 1) Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum indikatornya Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan.
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah koordinasi yang diselenggarakan terlaksana sesuai target yaitu 1 kegiatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tercapai targetnya yaitu 95%.
 - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan terlaksana sesuai target yaitu 10 desa.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan DOKO Kabupaten Blitar

No	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	B	B	B	B	B	B	B	
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

	Pemerintahan Daerah											
2	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dengan desa/kelurahan			-	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan			-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
3	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan			-	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	
	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
4	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yg dilakukan			-	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	
	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan			-	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan			-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

	fisik yang ditindaklanjuti											
	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan			-	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Doko Kecamatan, pada pasal 7 ayat (1) ditetapkan **tugas** kecamatan adalah :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit Doko Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan publik;
- f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Doko Kecamatan, Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah tugas dan fungsi kecamatan serta berdasarkan Isu-Isu strategis RPJMD Kabupaten Blitar, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Kecamatan Doko meliputi :

- 1) Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan Stunting dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis Kesadaran Kesehatan Keluarga;
- 2) Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga Doko secara luas dan meningkatkan PAD;
- 3) Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung Lingkungan dengan Perubahan Perilaku Masyarakat dan Ketersediaan Sarana-Prasarana;
- 4) Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 5) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
- 6) Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Untuk menguraikan isu strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Doko diperlukan rencana strategi yang merupakan proses utama dalam menyusun strategi operasional dalam rencana kerja Kantor Kecamatan Doko adalah :

- a. Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
- b. Optimalisasi hubungan yang sinergi dengan 3 pilar dan kelompok-kelompok masyarakat sebagai sarana lini terdepan dalam meminimalisir masalah di masyarakat;
- c. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa dan aparatur desa
- d. Penerapan Manajemen kinerja yang berorientasi hasil/ dampak

Dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Doko masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan PATEN

2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan
3. Belum optimalnya koordinasi linmas
4. Belum optimalnya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan
5. Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan
6. Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya dan lembaga kemasyarakatan
7. Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Doko maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Doko adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Doko agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Doko, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Doko untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain:

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA SKPD dengan cara mengusulkan kepada SKPD terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;

4. Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi tata administrasi dan pengelolaan desa di wilayah agar tercipta desa dengan kualitas layanan dan administrasi yang baik.
5. Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemberdayaan masyarakat, UMKM dan pariwisata melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM dan Pariwisata.
6. Meningkatkan peran PKK dalam membangun kesadaran keluarga dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Doko Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana Doko, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Doko Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public
7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Disamping mengacu pada RPJMN Nasional, Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan 2024 RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui Doko Bersama dan Gotong Royong.

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka Isu-isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Blitar sebagai berikut :

- 1) Pentingnya pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal.
- 2) Tantangan untuk memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi.
- 3) Pentingnya percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
- 4) Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga Doko secara luas dan meningkatkan PAD.
- 5) Pentingnya keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.
- 6) Mengakselerasi pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan sarana prasarana dasar.
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana.
- 8) Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak, dan ketersediaan air bersih.
- 9) Pentingnya mengintegrasikan treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.
- 10) Keberpihakan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difabel dan penyandang kesejahteraan social.
- 11) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
- 12) Tantangan penyediaan layanan public yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Untuk dapat Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisa Kebutuhan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Blitar

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Doko Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Target		
			2023	2024	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	Persen	100	100	Kec. Doko
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kali	24	24	Kec. Doko
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	24	24	Kec. Doko
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Doko Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Jenis	6	6	Kec. Doko
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	24	Kec. Doko
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	Kec. Doko
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kali	5	5	Kec. Doko

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	24	Kec. Doko
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	12	Kec. Doko
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	Kec. Doko
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100	Kec. Doko
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	Kec. Doko
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	Kec. Doko
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Persen	100	100	Kec. Doko
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	11	Kec. Doko
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	Kec. Doko
Koordinasi dan pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	14	14	Kec. Doko
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	Kec. Doko
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarka tugas pokok dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	18	18	Kec. Doko

Kegiatan Administraasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Persen	100	100	Kec. Doko
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kec. Doko
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	Kec. Doko
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	Kec. Doko
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	Kec. Doko
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	Kec. Doko
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	36	Kec. Doko
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Persen	100	100	Kec. Doko
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	4	Kec. Doko
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Persen	100	100	Kec. Doko
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Kec. Doko
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kec. Doko
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	100	Kec. Doko
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	2	Kec. Doko
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	Kec. Doko
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	unit	6	8	Kec. Doko

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	5	5	Kec. Doko
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	5	5	Kec. Doko
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	Kec. Doko
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	Kec. Doko
Penumbuhan Kesadaran Kelaurga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat	keluarga	30	30	Kec. Doko
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat	Dokumen	20	20	Kec. Doko
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan	kali	12	12	Kec. Doko
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	12	12	Kec. Doko
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	20	20	Kec. Doko
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	dokumen	12	12	Kec. Doko

2.5 Penelaah Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Doko mempunyai tugas utama pelayanan kepada masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsi perannya sebagai unsur penyelenggara sebagaimana kewenangan pemerintahan dari Bupati dan tugas lain penyelenggaraan pemerintahan di Desa / Kelurahan .

Permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan, tentunya mengalami kendala / permasalahan pokok apalagi tantangan ke depan semakin berat seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Setelah Tahun berjalan program dan kegiatan sebagaimana sudah terealisasi, Kantor Kecamatan Doko mengajukan beberapa usulan Program dan Kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat untuk tahun berikutnya. Beberapa proses dalam mengusulkan program dan kegiatan adalah perlunya koordinasi antara Camat, Sekretaris camat, semua Kasi dan Staf kecamatan. Dengan demikian akan tersusun beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara keseluruhan ada 5 (lima) program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa kegiatan.

Program dan kegiatan yang diusulkan tentunya harus sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Untuk menentukan Program dan kegiatan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Blitar. Program dan kegiatan dengan penetapan indikator kinerja Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian.

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Doko antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

69	1277848	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan (PENA INTAN)	Kurangnya pelatihan pada disabilitas sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut para disabilitas dapat mengembangkan diri sesuai dengan bidangnya masing-masing	Jl Sersan Tojib Nomor 35 Suru-Doko, Kab. Blitar	Suru	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Usulan sudah sesuai dengan prioritas pembangunan tapi belum dilengkapi dengan volume sasaran kegiatan dan dokumen yang dipersyaratkan; 2. Dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.	
79	1280224	Pelatihan Digital Entrepreneur (PENA INTAN)	Pera Pelaku UMKM Khususnya Masyarakat PENA INTAN masih minim pengetahuan tentang Digital Entrepreneur	Desa Kalimanis, Kab. Blitar	Kalimanis	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Usulan sudah sesuai dengan prioritas pembangunan tapi belum dilengkapi dengan volume sasaran kegiatan dan dokumen yang dipersyaratkan; 2. Dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.	
81	1280654	Bimtek Pengembangan BUMDESA	kurangnya pemahaman, keterampilan, dan ketrampilan kepada kelompok BUMDES dalam mengelola bisnis mereka dengan efektif dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa	Jln Supriadi No. 06 Rt. 04 Rw. 03 Dusun Resapombo Desa Resapombo, Kab. Blitar	Resapombo	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai dengan program prioritas pembangunan - Dapat dilanjutkan	
94	1286001	Bimtek Pengelolaan Aset Desa	Perlunya Bimbingan Teknis Tentang Aset Desa	Pemerintah Desa Doko, Kab. Blitar	Doko	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai dengan prioritas pembangunan, dapat dilanjutkan	

95	1286058	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Perlunya Bimbingan Teknis Terkait Keuangan Desa	Pemerintah Desa Doko, Kab. Blitar	Doko	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai dengan program prioritas pembangunan - Dapat dilanjutkan	
98	1287171	Pembuatan Aplikasi	Desa Sumberurip ingin menerapkan pelayanan Desa Secara digital agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat tepat dan prima, karena hal itu dibutuhkan aplikasi yang dapat menampung dan melayani keutuhan masyarakat tersebut.	Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, Kab. Blitar	Sumberurip	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Usulan sudah sesuai dengan prioritas pembangunan; 2. Perlu ditentukan jenis atau bentuk aplikasi sehingga dapat diketahui volume dan besaran anggaran; 3. Dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.	

99	1287337	Peningkatan SDM teknologi informasi	Para pelaku pelayanan di Desa Sumberurip dan para kader Digital Desa Sumberurip mempunyai minat dan loyalitas tinggi dalam pelayanan dan penyampaian promosi desa, namun masih membutuhkan banyak literasi agar dapat memperkuat dan menambah tingkat SDM tersebut. maka dari itu kami membutuhkan literasi Digital dan Pengembangan Website Desa dan lampenyampaian informasi dan promosi Desa.	DESA SUMBERURIP KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR, Kab. Blitar	Sumberurip	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Usulan sudah sesuai dengan prioritas pembangunan; 2. Perlu ditentukan sasaran kegiatan sehingga dapat diketahui volume dan besaran anggaran; 3. Dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.	
100	1287413	Pelatihan Digitalisasi Arsip Desa bagi Pengelola Arsip Tanah Desa	Desa Sumberurip Dalam pengarsipan data data penting masih menggunakan cara manual dan rawan kehilangan Data, maka kami butuh pelatihan tentang kearsipan secara Digital	DESA SUMBERURIP KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR, Kab. Blitar	Sumberurip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai prioritas pembangunan	

Beri Sekor Nilai setiap usulan 1 sampai 10

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	SEKOR NILAI
17	1257252	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa Plumbangan, Kab. Blitar	Plumbangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai dengan prioritas pembangunan	
18	1257339	Pelatihan Pengelolaan Arsip Keluarga	banyaknya masyarakat yang kurang memahami pentingnya arsip dan dokumen keluarga	Desa Plumbangan, Kab. Blitar	Plumbangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai prioritas pembangunan	
49	1275724	Pelatihan Pengelolaan Arsip Keluarga	pentingnya memelihara arsip perorangan maupun arsip keluarga yang berhubungan dengan aset, riwayat pendidikan dan sebagainya	Desa Jambepawon Kec Doko, Kab. Blitar	Jambepawon	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai prioritas pembangunan	
53	1275742	Pelatihan Kepustakaan dan Pengembangan Minat Baca	meningkatkan niat baca masyarakat dan terutama anak sekolah agar tidak kecanduan akan gawai	Desa Jambepawon Kec Doko, Kab. Blitar	Jambepawon	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Supaya menyampaikan surat permohonan kegiatan	
61	1275757	Pelatihan Kepustakaan dan Pengembangan Minat Baca	menurunnya minat baca khususnya bagi remaja	Dess Sidorejo, Kab. Blitar	Sidorejo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Supaya menyampaikan surat permohonan kegiatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham

(*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam Permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya

kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal ini telah sejalan dengan visi Kabupaten Blitar yang dijabarkan ke dalam misi -misi yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka melaksanakan Rencana pembangunan daerah Lima Tahun Kedepan maka OPD Kecamatan Doko harus mengacu pada visi dan misi kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026, sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera berladaskan Akhlak Mulia (Baladun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur)”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.
- MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
- MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.
- MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Doko sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan**

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya” dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Doko pada tahun 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
2. Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing - masing). Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada tahun 2024, ditetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa dengan indikator sasaran Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti;
2. Sasaran meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang dapat diselesaikan;
3. Sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator sasaran persentase desa yang memiliki administrasi baik dan jumlah bumdes yang dikelola dengan baik;
4. Sasaran meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas, Kantor Kecamatan mengambil langkah-langkah prioritas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan :

- a. Meningkatkan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban di

wilayah kecamatan.

- b. Meningkatkan kondisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kebijakan peraturan perundang – undangan yang ada ;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan anggaran secara baik dan benar ;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan public
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat
- f. Meningkatkan system pelaporan Satuan Doko Perangkat Daerah (SKPD)

Adapun gambaran sasaran dan tujuan dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95
		1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100%
2.	Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat		Indeks Kesalehan Sosial	Nilai	100)
		2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	Persen	100
3.	Meningkatkan akutabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B
			Persentase desa mandiri di kecamatan	Persen	80
		3. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	68
		4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Desa Yang NaikKelas	Jumlah	2
			Persentase Desa Mandiri di Kec	Persen	90

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Dokosama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Doko merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Blitar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah Doko tertentu. Kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi : menyusun kebijakan teknis operasional kecamatan; menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menyelenggarakan pembinaan wilayah; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; melaksanakan pelayanan publik, menyusun laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

1. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Doko diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Doko merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDGs

Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja

Kecamatan Doko diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan peDokoan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Blitar. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Doko. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan peDokoan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit Doko wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Doko

sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Doko diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Doko sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Blitar memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Blitar. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan Doko, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Doko melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Doko ini.

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Doko Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 13 Kegiatan.

Program dan indikator program yang ditetapkan oleh Kecamatan Doko Kabupaten Blitar adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota indikatornya adalah Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik indikatornya adalah persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan indikatornya adalah Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya adalah Jumlah fasilitasi dan koordinasi
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah Jumlah peraturan perundang-undangan desa yang dibuat

Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dengan target capaian 100%;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan target capaian 100%;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikatornya adalah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target capaian 100%;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah indikatornya adalah persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan target capaian 100%;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat sasaran dengan target capaian 100%;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikatornya adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan tepat waktu dengan target 100%;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik targetnya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan indikatornya adalah Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan targetnya 4 kali;

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Doko Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan indicator jumlah layanan yang dilaksanakan targetnya 4 jenis;
 - c. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat indikatornya adalah jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan target 5 dokumen.
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa indikatornya adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan target 5 kali.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator Jumlah kegiatan yang dilaksanakan targetnya 5 kegiatan.
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator jumlah kegiatan yang dilaksanakan targetnya 15 kali;
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah indikatornya adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan perkara yang dilakukan targetnya 5 kegiatan.
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya adalah Jumlah rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan dengan target 12 kali.
2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Doko sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Doko dan melingkupi semua Desa.
3. Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.
Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif adalah sebesar :
Rp 2.296.054.683,00 yang seluruhnya bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Blitar.

4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BLITAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2024	APSD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN DOKO							2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	-180.232.519,00							2.309.984.000,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	-180.232.519,00							2.309.984.000,00		
	7.01	KECAMATAN							2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	-180.232.519,00							2.309.984.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-			-	-	-	2.269.828.500,00	2.397.546.540,00	2.078.580.481,00	-289.108.300,00							1.980.720.200,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	-	-	5.400.000,00	3.117.138,00	3.117.138,00	-2.282.862,00			-	-	-		8.500.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.01.0001	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	2.700.000,00	1.598.418,00	1.598.418,00	-1.101.582,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi/ Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	2.700.000,00	1.518.720,00	1.518.720,00	-1.181.280,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	-	-	1.609.868.000,00	1.720.456.540,00	1.441.670.481,00	-168.197.519,00			-	-	-		1.666.454.517,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.580.078.000,00	1.720.666.540,00	1.399.845.481,00	-180.232.519,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.600.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	28.440.000,00	28.440.000,00	40.475.000,00	12.035.000,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.100.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi/ dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.354.517,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	-	-	70.000.000,00	98.060.000,00	94.160.000,00	-24.160.000,00			-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	18 Orang	70.000.000,00	98.060.000,00	94.160.000,00	-24.160.000,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	-	-	120.341.061,00	133.346.845,00	126.185.482,00	5.844.421,00			-	-	-		70.265.683,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisokan				1 Paket	1 Paket	1.649.682,00	1.649.682,00	1.649.682,00	0,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.550.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peninghapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peninghapan Kantor yang Didisokan				2 Paket	2 Paket	33.248.075,00	40.934.344,00	40.933.973,00	7.685.898,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.281.683,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Didisokan				1 Paket	1 Paket	1.431.234,00	3.101.229,00	3.101.229,00	1.669.995,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisokan				2 Paket	2 Paket	2.577.198,00	12.429.558,00	12.429.558,00	9.852.360,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.434.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisokan				2 Paket	2 Paket	7.964.472,00	4.141.632,00	4.178.040,00	-3.786.432,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ SKPD				36 Laporan	36 Laporan	73.470.400,00	71.090.400,00	63.893.000,00	-9.577.400,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Mtk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	-	65.656.011,00	173.912.145,00	178.943.508,00	113.286.897,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Didisokan				4 Unit	4 Unit	65.656.011,00	173.912.145,00	178.943.508,00	113.286.897,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisokan			-	-	1 Unit	0,00	0,00	103.860.000,00	103.860.000,00	Kab. Blitar, Doko, Semua Kec/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	-	130.372.828,00	132.563.872,00	127.813.872,00	-2.556.956,00			-	-	-		93.000.000,00	KECAMATAN DOKO	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANAKOT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.387.200,00	9.387.200,00	9.387.200,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.01.2.05.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.985.628,00	123.176.672,00	118.426.672,00	-2.556.956,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	268.190.000,00	106.690.000,00	106.690.000,00	-161.500.000,00			-	-	-		47.500.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disediakan Pakai dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	67.200.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	195.500.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-161.500.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN DOKO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	12.050.000,00	14.550.000,00	17.750.000,00	58.301.000,00							70.351.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	9.800.000,00	12.300.000,00	15.500.000,00	5.700.000,00			-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24 Laporan	24 Laporan	9.800.000,00	12.300.000,00	15.500.000,00	5.700.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibebankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00			-	-	-		25.351.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.02.2.02.0002	Facilitasi Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.351.000,00	KECAMATAN DOKO
3.	7.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	32.522.000,00	39.607.500,00	44.152.500,00	-12.522.000,00							20.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	9.872.000,00	12.457.500,00	12.457.500,00	2.585.500,00			-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Masyarakat katan	5 Lembaga Masyarakat katan	9.872.000,00	12.457.500,00	12.457.500,00	2.585.500,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	22.650.000,00	27.150.000,00	31.695.000,00	9.045.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	30 Keluarga	22.650.000,00	27.150.000,00	31.695.000,00	9.045.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DOKO
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	47.790.000,00	59.790.000,00	50.190.000,00	135.122.800,00							182.912.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	-				-	-	47.790.000,00	59.790.000,00	50.190.000,00	2.400.000,00			-	-	-		182.912.800,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	41.790.000,00	45.090.000,00	35.490.000,00	-6.300.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Bitar, Doko, Semua KesiDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.912.800,00	KECAMATAN DOKO
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	51.600.000,00	42.885.000,00	42.885.000,00	4.400.000,00							56.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	51.600.000,00	42.885.000,00	42.885.000,00	-8.715.000,00			-	-	-		56.000.000,00	KECAMATAN DOKO
	7.01.06.2.01.0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN BELJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024					RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	13.050.000,00	18.135.000,00	18.135.000,00	5.085.000,00	Kab. Bitar., Doko, Semus Kiri-Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.05.2.01.0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	23.200.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	-6.100.000,00	Kab. Bitar., Doko, Semus Kiri-Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN DOKO
7.01.05.2.01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	15.300.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	-7.650.000,00	Kab. Bitar., Doko, Semus Kiri-Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN DOKO
J U M L A H									2.413.790.500,00	2.554.379.040,00	2.233.557.981,00	247.302.617.423,00							2.309.984.000,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada tahun 2024 merencanakan program dan 13 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp. 2.298.054.683,00. Secara keseluruhan ada 5 program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.136.042.183,00 dengan kegiatan sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 3.117.138,00
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 1.500.987.183,00
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 93.880.000,00
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 134.726.482,00
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp 168.847.500,00
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 127.813.872,00
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp 108.690.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Rp 17.750.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan pagu anggaran Rp 15.500.000,00
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 2.250.000,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Pagu Rp 43.402.500,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp 12.457.500,00
 - b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp 30.945.000,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu Rp 55.705.000,00 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp 55.705.000,00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu Rp 43.155.000,00 ;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp 43.155.000,00

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Doko pada tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan ke depan.

Rencana Doko ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di Tahun 2024, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Kecamatan Doko, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada saat penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran Kecamatan Doko tidak sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap beberapa kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Doko Anggaran (RKA) OPD.

Harapannya adalah Rencana Doko ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Doko, September 2024

Camat Doko



M.NUR ANDY AZIS,SP,MM

Pembina Tk I

NIP 19720914 199803 1 005